

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai evaluasi proses, output dan efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di KBU, khususnya di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perda, walaupun sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan, tetapi masih banyak pelanggaran pada pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Kawasan KBU, khususnya di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
2. Hasil evaluasi terhadap output pelaksanaan Perda, walaupun regulasi daerah yang menetapkan KBU sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, namun berbagai regulasi / kebijakan, baik Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031, dan Perda Jabar Nomor 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, serta beberapa kebijakan pemerintah lainnya, dalam pelaksanaannya belum dijalankan dengan baik dan tegas oleh Pemerintah terkait, sehingga terdapat kesan bahwa berbagai kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap pengendalian pemanfaatan lahan dan kerusakan lingkungan di KBU.

3. Hasil evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah belum secara tegas melaksanakan sanksi kepada masyarakat dan pengusaha yang melakukan pelanggaran dalam pembangunan dan pemanfaatan lahan di Kawasan KBU, khususnya di kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, sehingga hal ini dapat menimbulkan pelanggaran semakin banyak, karena tidak ada efek jera. Sanksi yang dapat diterapkan ialah sanksi administrasi, sanksi pidana, serta sanksi biaya paksaan penegakan hukum.

## **6.2 Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Distaru, Satpol PP, dan Pemerintah Kota Bandung harus lebih meningkatkan frekuensi, pemilihan materi, dan metode sosialisasi dan penyuluhan, agar masyarakat dan pengusaha benar-benar memahami dan berkeinginan untuk mematuhi isi Perda ketika melakukan pembangunan dan pemanfaatan lahan di KBU.
2. Pihak Distaru, Satpol PP, dan Pemerintah Kota Bandung harus lebih tegas dalam memberikan perijinan terkait pembangunan di KBU, dan harus disertai rekomendasi dari Gubernur, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada setiap pembangunan dan pemanfaatan lahan secara berkala di Kawasan KBU.

3. Pihak Distaru, Satpol PP, dan Pemerintah Kota Bandung harus segera melakukan pemberian sanksi (melakukan pembongkaran, pemberian sanksi administratif dan pidana) bagi pelanggar, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pengusaha di Kawasan KBU, khususnya di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Hamilton Printing Company.
- Fariied, Alie. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Reflika Aditama
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Islamy, Muh. Irvan. 2013. *Kebijakan Publik, Modul 1*. Jakarta : Lembaga Penerbit UT
- Laporan Tahunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Jawa Barat.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D. Riant. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani.2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FISIP Universitas Moestopo Beragama.

- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo. 2017. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi*). Dalam *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cetakan Ke-13. Jakarta: Rajawali Pers
- Zainal, Arifin. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda

#### **INTERNET/JURNAL**

- Humas Bappeda Jabar, "Titik Terang Revisi Perda KBU", <http://bappeda.jabarprov.go.id/titik-terang-revisi-perda-kbu/>
- Nia Pusparini Aqil. Pengendalian mengenai Pemanfaatan Lahan Di Kawasan Bandung Utara Kecamatan Cidadap Kota Bandung, *SOSIOHUMANITAS*, VOL. XXII Edisi 2, Agustus 2020. Diakses dari <http://journal.unla.ac.id/index.php/sosiohumanitas/article/view/1572>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 16,30.
- Novie Indrawati Sagita, Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara. *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 96 – 106. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11051>, diakses tanggal 7 Juli 2021
- Putra Arta Samodro, Kajian Daya Dukung Lingkungan dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Environmental, Program Studi Magister Inovasi Regional, Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN* Volume 8 Nomor 3 (Bandung: LP Pasca

Unpad, 2020), hal. 214-229. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.8.3.214-229>, tanggal 7 Juli 2020, pukul 16.50.

Taufik, Mhd. dan Isril, Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2. (Riau: Lembaga Penerbit FISIP Universitas Riau, 2013)

Yulinda Adharani dan R. Adi Nurzaman, Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, (Bandung: LP Unpad, 2017)

Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/281688/walhi-jabar-tuntut-setop-alih-fungsi-lahan-di-puncut>, diakses tanggal 1 April 2021, pukul 18.41

Diakses dari <https://jabarjuara.co/read/alih-fungsi-lahan-di-kawasan-bandung-utara-memprihatinkan>, diakses tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.10.

Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/281688/walhi-jabar-tuntut-setop-alih-fungsi-lahan-di-puncut>, diakses tanggal 28 Maret 2021, pukul 17.00.

Diakses dari <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 31 Maret 2021, pukul 11.42

Diakses dari <https://www.webster-dictionary.org/definition/implementation>, implementation - the act of accomplishing some aim or executing some order; "the agency was created for the implementation of the policy". Implementation - the act of implementing (providing a practical means for accomplishing something), diakses 31 Maret 2021, pukul 13.13

Diakses dari <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/1057>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 15.26

Diakses dari <https://nasional.tempco.co/read/601022/penertiban-bangunan-liar-di-bandung-utara-mandek/full&view=ok>, diakses pada tanggal 41 Juli 2021 pukul 16.00

Diakses.<https://regional.kompas.com/read/xml/2016/11/11/05350011/cekungan.bandung.sedang.sakit.stop.izin.properti.komersial.>, diakses tanggal 13 Juli 2021 pukul 16.45

Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01310970/alih-fungsi-lahan-capai-70-kawasan-bandung-utara-sudah-sekarat?page=2>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 10.25.

Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q5fwk3284/100-bangunan-terindikasi-langgar-tata-ruang-kbu>, diakses tanggal 8 Juli 2021

Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/281688/walhi-jabar-tuntut-setop-alih-fungsi-lahan-di-punclut>, diakses tanggal 9 Juli 2021

Diakses dari sini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200511/47/1239009/rawan-bencana-proyek-properti-di-bandung-utara-harus-dibatasi>, diakses tanggal 14 Juli 2021

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031

Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/1057>, Penegakan Zonasi Harus Dilakukan dalam Penataan Daerah Punclut, diakses tanggal 1 April 2021, pukul 19.08